WAWASAN NUSANTARA DALAM MEMECAHKAN KONFLIK KEBUDAYAAN NASIONAL

DEVRYTA AYU PUTRI DESTIAWAN

IIK STRADA INDONESIA (S1 FARMASI)

devrytaayu1@gmail.com

ABSTRAK

Konflik antar budaya di Indonesia saat ini masih menjadi problematika yang belum terselesaikan. Indonesia sebagai negara kepulauan melahirkan keragaman ras, suku, dan budaya yang melandasi konsep kebudayaan nasional. Potensi akan konflik kebudayaan tidak dapat kita hindari. Pada dasarnya keterkaitan antara Geopolitik Indonesia, wawasan nusantara, dan kebudayaan nasional sangat erat, akan tetapi masyarakat Indonesia masih belum menyadari hal tersebut. Melalui studi literatur kita mempelajari kembali konsep dasar kewarganegaraan sehingga di dalam kehidupan nyata dapat kita implementasikan sebagai solusi dari adanya fenomena konflik antar budaya di Indonesia. Konflik antar budaya yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh banyak hal seiring perubahan zaman, namun apabila kita cermati maka faktor utama dari konflik budaya tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat sebagai bagian dari kesatuan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita dan mempertahankan keutuhan Negara Indonesia. Dari hasil studi literatur dapat disimpulkan bahwa suatu bangsa dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya, yang didasarkan atas hubungan yang saling berkaitan antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi, dan cita-cita yang dihadapkan pada kondisi sosial masyarakat, budaya dan tradisi, keadaan alam dan wilayah serta pengalaman sejarah.

Kata Kunci: geopolitik indonesia, wawasan nusantara, konflik, kebudayaan nasional

1. Latar Belakang

Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan Archipelago Concept yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai Tanah Air dan ini disebut negara kepulauan (Pasaribu, 2015). Ditinjau dari fenomena geografi Indonesia maka hal tersebut mengakibatkan kondisi masyarakat dengan multi budaya. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara keanekaragaman (pendapat, kepercayaan, hubungan, dsb) memerlukan suatu perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu guna memelihara keutuhan negaranya. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan

kehidupannya, memerlukan suatu konsepsi berupa Wawasan Nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri. Sebagai sebuah negara dengan multi budaya, maka Indonesia memiliki potensi yang besar untuk terjadi konflik antar budaya dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam kehidupan Bangsa Indonesia sebagaimana yang terlihat pada waktu belakangan ini di sejumlah daerah dapat digolongkan sebagai konflik yang mempunyai potensi mengancam dan membahayakan keutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Konflik antar daerah, suku, agama, serta kelompok yang sekarang

sering terjadi hanya akan memecah belah semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

2. Kasus/Masalah

Kondisi geografis Indonesia memaksa masyarakatnya untuk tinggal menetap di daerah yang terpisah-pisah satu sama lain dan tersebar di berbagai titik. Mereka kemudian membentuk sebuah kelompok sosial yang didasari atas kesamaan lingkungan geografis dan hubungan timbal-balik secara intens. Masing-masing kelompok sosial memiliki ciri yang berbeda dikarenakan pola pikir, perilaku dan penyesuaian diri yang berbeda antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya. Hal tersebut menghasilkan sebuah identitas yang disepakati bersama dan dilestarikan di dalam sebuah kelompok sosial, sehingga tercipta suatu kebudayaan. Perbenturan budaya yang terjadi antar kelompok sosial itu lah yang disebut sebagai konflik kebudayaan.

3. Tinjauan Pustaka

Kebudayaan nasional itu merupakan “puncak-puncak dari kebudayaan daerah” sebagaimana apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Politik Kebudayaan Nasional tidak hanya menyatakan dirinya dalam Kongres Kebudayaan tahun 1991, namun Kebudayaan Nasional secara tidak langsung “disebarluaskan” dan

diwujudkan melalui penataran ideologi, yaitu penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4). Pancasila menjadi sumber dari semua nilai dan aturan (norma) dan ditempatkan pada kedudukan tolak ukur tunggal bagi nilai dan norma yang berlaku dan boleh dipedomi, sebagai arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Bangun,1991). MPR-RI melalui amandemen kedua UUD 1945, telah mengamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Berdasarkan peraturan tersebut dapat kita ketahui bahwa undang-undang mengakui perbedaan suku bangsa yang besar di antara penduduk Indonesia dan menjamin persamaan status bagi semua sukubangsa yang ada tanpa melihat besarnya penduduk masing-masing suku bangsa. Semua suku bangsa memiliki hak yang sama untuk mengembangkann kebudayaan dan bahasa mereka masing-masing, membentuk pusat-pusat kebudayaan mereka sendiri, museum, dan lain-lain, namun bahasa yang digunakan dalam pendidikan resmi adalah bahasa Indonesia.

4. Pembahasan

Berbeda dengan konsep politik dunia yang dikemukakan oleh beberapa ahli di dunia, Indonesia memiliki konsep geopolitik sendiri yang dicetuskan oleh Ir. Soekarno. Para pendiri negara Republik Indonesia sepakat bahwa wilayah Indonesia merdeka hanyalah wilayah bekas jajahan Belanda atau Hindia Belanda. Oleh karena

itu, Indonesia tidak ada keinginan untuk memperluas wilayah. Ilmu geopolitik mempelajari fenomena geografi dari aspek politik. Indonesia memiliki kondisi geografis yang sangat kompleks, yaitu berupa negara kepulauan. Sehingga penduduknya tersebar di berbagai titik mendiami pulau-pulau yang dipisahkan oleh perairan Indonesia. Ilmu geopolitik mempelajari fenomena geografi tersebut dari sudut pandang politik. Di dalam ilmu politik, syarat sebuah bangsa adalah segerombolan manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu. Maka Indonesia membutuhkan suatu perekat untuk mewujudkan persatuan di antara masyarakatnya demi kelangsungan hidup bangsa. Perekat tersebut diwujudkan dalam bentuk konsep cara pandang bangsa terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Hal itu tertuang dalam konsep Wawasan Nusantara. Pembentukan konsep Wawasan Nusantara dilatarbelakangi oleh pemikiran berdasarkan empat aspek, yaitu: (1) Falsafah Pancasila, (2) Aspek kewilayahan, (3) Aspek sosial budaya, dan (4) Aspek kesejarahan. Apabila ditinjau dari aspek sosial budaya, maka Indonesia merupakan negara dengan multi budaya, hal ini disebabkan oleh faktor geografis dan sejarah, namun keanekaragaman budaya tersebut menjadi bagian dari satu kesatuan budaya, yaitu kebudayaan nasional yang mengacu pada nilai-nilai luhur budaya Indonesia dalam rumusan Pancasila. Pancasila menjadi tolak ukur utama dalam pelaksanaan Kebudayaan Nasional, sehingga dalam mewujudkan persatuan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia distakuan melalui prinsip Bhineka Tunggal Ika. Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat

yang bersangkutan. Artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat akan mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Warisan budaya diterima secara emosional dan bersifat mengikat ke dalam (Cohesiveness) sehingga menjadi sangat sensitif. Berdasar ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi, masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relative rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik. Besarnya potensi konflik antar golongan di masyarakat yang setiap saat akan membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, dalam menghadapi konflik budaya kita membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam, namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.

5. Kesimpulan

Wawasan Nusantara tidak hanya sebuah konsep tentang cara pandang terhadap bangsanya sendiri, namun juga menyadarkan rakyat bahwa keanekaagaman budaya di antara masyarakat Indonesia berada di dalam satu kebudayaan yang mengikat di dalam sebuah negara yang memiliki arah yang sama yaitu mewujudkan persatuan dan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Secara geografis menyebabkan penduduk Indonesia terpisah dan berkembang menyesuaikan lingkungannya membentuk sebuah kelompok sosial yang memiliki ciri khas

masing-masing, namun hal itu bukan berarti suatu kelompok sosial yang memiliki kebudayaan tadi bertujuan untuk bersaing dan menguasai budaya lain sehingga menimbulkan konflik antar budaya. Rendahnya pemahaman dasar sebagai warga negara Indonesia menyebabkan etnosentrisme yang dapat mengancam integrasi bangsa. Oleh karena itu perlu untuk kita kembali mempelajari Wawasan Nusantara. Perlu adanya pendidikan moral, pengembangan wawasan, ketrampilan serta penanaman rasa nasionalisme pada generasi muda, karena merekalah tulang punggung negara di masa yang akan datang. Salah satunya melalui penanaman nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila dan semboyan bangsa kita “Bhinneka Tunggal Eka” kepada mereka sehingga mereka kelak ketika mereka menjadi pemimpin, bukan hanya sebagai Ulil Amri atau Umara tetapi juga bersifat Khadimul Ummah (pelayan umat) dalam segala bidang aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa melihat kaya miskin, pejabat atau rakyat, suku, ras, agama atau hal yang lain karena semua adalah sama dan tetap satu yaitu untuk Indonesia (Najicha, 2017).

Dwi Sulisworo, T. W. (2012). Program Studi Kewarganegaraan Hibah Non Konvensional. Yogyakarta: Universitas Ahmad Dahlan.

Harahap, S. (2018). Konflik Etnis dan Agama di Indonesia. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama, No. 2, Vol. 1.

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. Literasi Media Publishing.

DESTIAWAN, D. A. P. (2021). PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA & HAK ASASI MANUSIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN NKRI.

6. Daftar Pustaka

Bangun, P. (1991). Kongres Kebudayaan 1991: Kebudayaan daerah dan Kebudayaan Nasional (Abstraksi). Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.